



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022/2024 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan tahun 2024 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Perjanjian Kinerja LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 memuat gambaran perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026 dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Seruyan 2024-2026.

Akhirnya laporan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 dapat disusun dengan baik, dan kami harap dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif sehingga dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan demi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 3 Maret 2025

Kepala Dinas,



JUNAIDI, SIP.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670712 198911 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
A. Struktur Organisasi	6
B. Sumber Daya Manusia	8
1.3 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Instansi	17
3.2 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Komposisi ASN Menurut Jenis Jabatan	8
Tabel 1.2	Kompposisi ASN Menurut Golongan	8
Tabel 1.3	Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.1	Pengukuran Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumna	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD	18
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	18
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	19
Tabel 3.6	Analisis Penggunaan Atas Efisiensi Sumberdaya	20
Tabel 3.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	21
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	22
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Daerah DP3AP2KB Tahun 2024	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun laporan. Dokumen ini mencerminkan pencapaian terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis instansi, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.

Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga;
- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan anak;
- d. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya perencanaan keluarga;
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak;
- d. Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai mempunyai 10 Program, 25 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 bidang dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tahun 2024 capaian kinerja sasaran (outcome) belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, sehingga masih perlu adanya evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP disusun setiap tahun yang menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

- Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Kerja : Dan Keluarga Berencana
- Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Fungsi : a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah;
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan;
c. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
e. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi;
f. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
g. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (Kg)

Dan Hak Anak Tingkat Daerah;

- h. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;
- i. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;
- j. Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah;
- k. Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha;
- l. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- m. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah;
- n. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; Dan
- o. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

1. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, Membina, Merencanakan, Mengoordinasikan, Menetapkan Serta Menyelenggarakan Program Kerja, Tata Kerja Dan Mengembangkan Semua Kegiatan Dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Bertanggung Jawab Atas Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Dinas.

Fungsi : a. Perumusan Dan Penetapan Rencana Kebijakan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;

b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;

c. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;

d. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan

e. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan.

2. Sekretaris

Tugas : Mengoordinasikan Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Serta Memberikan Pelayanan Administratif Dan Teknis Kepada Semua Unsur Di Lingkungan Dinas.

- Fungsi : a. Perumusan Dan Perencanaan kegiatan Program Kerja Sekretariat;
b. Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Dinas
c. Pengoordinasian Administrasi Keuangan Dinas
d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas
e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas
f. Pengoordinasian Administrasi Umum Dinas
g. Pengoordinasian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas;
h. Pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas
i. Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas
j. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan
k. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan Dipimpin Oleh Kepala Subbagian Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas : a. Merumuskan Dan Merencanakan Kegiatan Program Kerja Pada Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan
b. Melaksanakan Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
c. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
d. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas
e. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas;
f. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kinerja Dinas;
g. Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
h. Menilai Dan Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan
i. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas : a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas

- c melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas
- d melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas
- e melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas
- f menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan
- g melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tugas : merumuskan kebijakan teknis dan operasional program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Fungs : a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

b. perumusan dan Mensosialisasikan Pelaksanaan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten;

c. pelaksanaan sosialisasi dan Mengkoordinasikan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten;

d. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten;

e. pelaksanaan sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten;

f. pengoordinasian dan mensosialisasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;

g. pengoordinasian dan Mensosialisasikan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;

h. pengoordinasian Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten;

i. pelaksanaan sosialisasi dan perumusan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten;

j. perumusan dan pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten;

k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

3. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Tugas : Mengelola Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Fungsi :

- a. Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. perumusan dan mengkoordinasikan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten;
- c. pengoordinasian pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten;
- d. pelaksanaan sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten;
- e. perumusan dan mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten;
- f. pengoordinasian Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
- h. perumusan dan mengoordinasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;

pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana

Tugas : Pemaduan dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dan Pendayagunaan Tenaga PKB dan PLKB dalam upaya mewujudkan Program K.

Fungsi :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB
- b. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- c. perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten;

- d. pengoordinasian dan mensosialisasikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- e. pengoordinasian Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- f. penyeliaan dan Memeriksa Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- h. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tugas : Melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga, Advokasi, KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi : a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

b. perumusan, mensosialisasikan, dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

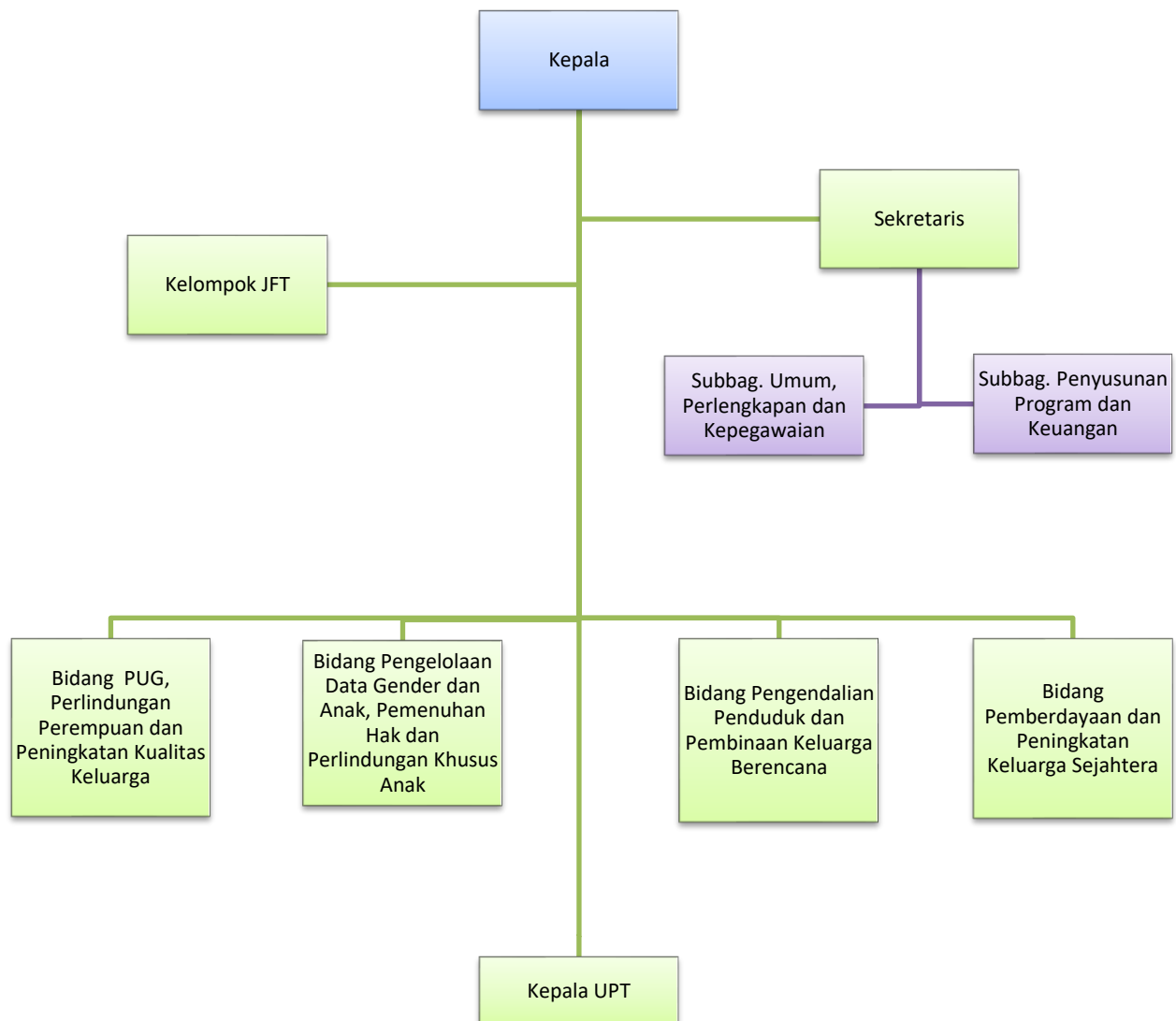
c. perumuskan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, Stuktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kabupaten Seruyan



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

B. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, seklaigus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dalam rangka penyeleggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Seruyan didukung sumber daya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis Jabatan, Menurut golongan, Menurut Jenis Pendidikan, dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Kepala UPT	1
6.	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	3
7.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	4
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2
9.	Pengadministrasi Perkantoran	12
10.	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
11.	Pranata Komputer Terampil.	2
Jumlah		34

Tabel 1.2
Komposisi ASN Menurut Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	1
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/a	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8.	-	9	2
9.	-	7	2
Jumlah			34

Tabel 1.3
Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana S2	7
2.	Sarjana S1	13
3.	Sarjana Muda / D3	5
4.	SLTA	9
	Jumlah	34

1.3 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan LKjIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dan Sistemayika LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada Awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ini dicapai perangkat daerah pada tahun yang berjalan serta bagaimana kaitannya dengan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksana tupoksi dan tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Seruyan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode tiga tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023.

Sebagai penjabaran dari pernyataan misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan.

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga;
- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan anak;
- d. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Sasaran.

- a. Meningkatnya perencanaan keluarga;
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak;
- d. Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah.

Berhubungan dengan keempat tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Seruyan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2024-2026 yang merupakan turunan dari masing-masing tujuan di atas, sasaran yang hendak diwujudkan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran 2024 - 2026								
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (capaian 2023)	Target Kinerja Sasaran pada tahun		
						2024	2025	2026
Meningkatkan Taraf Hidup	Persentase Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Orang/tahun	2,30	2,10	2,06	2,00
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	89,16	89,77	90,38	91,00
Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Pelaporan LHKPN	Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	CC	CC	CC
Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	skor	56,60	601-700	701-800	801-900

3. Program

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- Program Perlindungan Perempuan;
- Program Perlindungan Khusus Anak;
- Program Pemenuhan Hak Anak;
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- Program Pengendalian Penduduk;
- Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

4. Kegiatan.

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - g. Kegiatan Pelembagaan Pangarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - h. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - i. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - j. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkatan daerah kabupaten/kota;
 - m. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - n. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - o. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
 - p. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
 - q. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
 - r. Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - s. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - t. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - u. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
 - v. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - w. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - x. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - y. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Sub Kegiatan.
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Penagdaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - f. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- j. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- l. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- m. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- o. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- p. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
- q. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- r. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- s. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
- t. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG;
- u. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- v. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- w. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- x. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- y. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- z. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- aa. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- bb. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- cc. Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA;
- dd. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK;
- ee. Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- ff. Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- gg. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
- hh. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- jj. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota;
- kk. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK;
- ll. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
- mm. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

- nn. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- oo. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- pp. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB;
- qq. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;
- rr. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
- ss. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
- tt. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran startegis organisasi.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Rumus Perhitungan $TFR = 5 \sum_{45-49} i=15-19 \times ASFR_i$ $A/B \times 100\%$ A = Angka Kelahiran B = Wanita Usia Subur (WUS) (15 - 49 Tahun)	Aplikasi SIGA BKKBN (Pendataan Keluarga)
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}} \times 100$	Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan
3.	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Aplikasi SIGA

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja bagi instansi pemerintah adalah untuk menetapkan komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan pemerintah yang lebih tinggi dengan tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas, perangkat daerah harus bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja dan target yang telah ditentukan;
2. Mendorong pencapaian kinerja yang optimal, dengan menetapkan sasaran dan indikator yang jelas maka akan memberikan motivasi perangkat daerah untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan secara efektif.

3. Menjamin transparansi, agar ada pengawasan dan evaluasi yang lebih terbuka;
4. Memperkuat pengelolaan sumber daya, perangkat daerah akan lebih fokus dalam mengelola sumber daya yang ada;
5. Evaluasi kinerja secara periodik yang memungkinkan pihak yang berwenang untuk memberikan umpan balik dan perbaikan bagi instansi pemerintah.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	2,10	Program Pembinaan KB	1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB; 3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Program Pengendalian Penduduk	1. Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	64,4	Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Kegiatan Pelembagaan Pangarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
3.	Meningkatnya kondisi pembangunan	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	601 - 700	Program Pemenuhan	1. Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan
	yang berpihak pada anak.			Hak Anak	Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Instansi

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar meneliti keberhasilan dan kegagalan melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan perjanjian Kinerja. Dengan ini DP3AP2KB menyajikan informasi capaian kinerja yang mana isi tersebut diambil dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang termuat dalam sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	2,10	2,20	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	64,4	Belum Ada	Belum Ada
3.	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	601 - 700	937	937

Capaian TFR sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan data Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) adalah sebagai berikut :

CAKUPAN ANGKA KELAHIRAN HIDUP								
NO	KECAMATAN	JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS)					TFR	ASFR
		15 – 49 TH	JUMLAH ANAK YANG DILAHIRKAN	15 – 18 TH	JUMLAH ANAK YANG DILAHIRKAN			
1	Seruyan Hilir	6785	12203	980	13		1,80	13,27
2	Seruyan Hilir Timur	2108	4037	343	3		1,92	8,75
3	Danau Sembuluh	2394	4678	427	17		1,95	39,81
4	Seruyan Raya	5401	11479	743	48		2,13	64,60
5	Hanau	3092	7160	583	22		2,32	37,74
6	Danau Seluluk	514	2566	443	13		4,99	29,35
7	Seruyan Tengah	3560	10467	832	22		2,94	26,44
8	Batu Ampar	1532	3505	292	6		2,29	20,55
9	Seruyan Hulu	1332	2980	46	3		2,24	65,22
10	Suling Tambun	466	730	124	17		1,57	137,10
JUMLAH		27184	59805	4813	164		2,20	34,07

rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia produktifnya/

Wanita Usia Subur yaitu wanita berumur antar 15 – 49 tahun, dalam suatu populasi tertentu pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan data terinput pencatatan pengumpulan dan pengolahan data keluarga akhrit triwulan IV diperoleh angka jumlah Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun adalah 27.184. Anak yang dilahirkan adalah 59.805. Sehingga capaian target TFR adalah $= 59.805 : 27.184 = 2.20$ sedangkan target TFR 2024 adalah 2,10 dengan demikian sampai akhir triwulan IV mendekati ideal.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum ada nilai, hasil penilaian diperoleh dari Data BPS sekitar bulan Maret – April 2025.

Skor Kabupaten Layak Anak sejumlah 937 diperoleh berdasarkan penilaian mandiri, sedangkan hasil verifikasi dari KemenPPA samapi saat ini belum keluar.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2022 (n-2)	Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,30	2,30	2,10
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	63,2	66,83	Belum Ada
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	100	292	937

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPD
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,10	2,00
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum Ada	90,38
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	937	801-900

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,10	2,10

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum Ada	79,16
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	937	801-900

Tabel 3.5
Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal Yang Dilakukan/Solusi
1	TFR (Total Fertility Rate)		<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Tenaga Lini Lapangan PKB/PLKB dan Kader PPKBD - Tersedianya Juknis dan Juklak DAK BOKB pelaksanaan kegiatan. <p>Kegagalan :</p> <p>Jangkauan wilayah yang terlalu luas, sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak dapat menjangkau ke desa terpencil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan lengkap/mini lokakarya kader di desa - Kerjasama dengan faskes yang ada di setiap kecamatan. - Monitoring dan evaluasi
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Seruyan sejumlah 6 orang menunjukkan bahwa perempuan telah berperan aktif bidang politik - Peran aktif Organisasi perempuan yaitu DWP dan Forgawara yang mendukung proses pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. <p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga layanan perempuan belum terbentuk di setiap kecamatan. - Belum dilakukan perhitungan Anggaran Responsif Gender sesuai standar. 	Memverifikasi data kegiatan di setiap perangkat daerah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan penganggaran program responsif gender.
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)		<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemangku keputusan terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak - Tersusunnya Perda Tentang 	Membentuk Tim Gugus KLA

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal Yang Dilakukan/Solusi
			Kabupaten Layak Anak Kegagalan : Minimnya data dari perangkat daerah menyebabkan skor penilaian tidak mencapai target yang ditentukan.	

Tabel 3.6
Analisis Penggunaan Atas Efisiensi Sumberdaya

No	SKPD	Sumberdaya	Analisis
1	TFR (Total Fertility Rate)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga Lini Lapangan Penyuluh KB sejumlah 15 orang dan Petugas Lapangan KB sejumlah 38 orang adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan di 10 kecamatan - Tersedianya 10 Balai Penyuluhan KB yang tersebar di 10 kecamatan - Dukungan anggaran yang bersumber DAK BOKB beserta Juknis dan Juklak untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan KB di 10 kecamatan. - Tersedianya 3 orang tenaga fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berfungsi untuk memberikan edukasi dan orientasi lapangan serta menganalisis data kependudukan dan keluarag berencana. 	Dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari sumberdaya aparatur dan partisipasi aktif dari segala sektor untuk pencapaian target TFR
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peran aktif dari organisasi perempuan. - Kesadaran berpolitik memberi ruang untuk keterwakilan perempuan di DPRD. - Tersedianya data terpilah gender. - Tersedianya 3 orang tenaga fungsional Penyuluh Sosial yang berfungsi memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada kaum perempuan secara menyeluruh. 	Dibutuhkan dukungan sumber daya dan partisipasi aktif dari segala sektor untuk pencapaian target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Gugus KLA - Tersedianya sistem data terpilah gender dan anak - Tersedianya UPT PPA. - Tersedianya 3 orang tenaga fungsional Penyuluh Sosial yang berfungsi untuk memberikan pendampingan dan pembinaan langsung ke masyarakat. 	Dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari sumber daya dan partisipasi aktif dari segala sektor

No	SKPD	Sumberdaya	Analisis
		- Telah terbentuknya Forum Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kabupaten sebagai wadah penyaluran aspirasi perempuan untuk berkarya	

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
1	TFR (Total Fertility Rate)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana 	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya partisipasi aktif dari lembaga dan organisasi kemasyarakatan. - Kebijakan pemerintah yang mendukung progrm keluarga berencana. - Aksebilitas dan layanan kesehatan - Adanya edukasi dan penyuluhan tentang keluarga berencana. <p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan akses layanan KB. - Kurangnya edukasi dan penyuluhan yang efektif. - Ekonomi keluarga. - Kurangnya dukungan dari pasangan - Norma sosial budaya dalam wilayah keluarga. - Tingkat pendidikan pasangan usia subur.
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> - Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan keterlibatan dari pemerintah daerah. - Penyuluhan dan pendidikan gender. - Tersedianya Data dan sistem pemantauan yang kuat. - Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. - Kerjasama antar sektor dan stakeholder. <p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komitmen politik untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program. - Pemahaman yang terbatas dengan kesetaraan gender. <p>- Minimnya kapasitas sumber daya yang memadai untuk mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan dan program.</p>

No	Indikator Kinerja	Program	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat. - Kurangnya pengelolaan data terpilah gender.
3	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lingkungan yang layak bagi anak. - Hak untuk tumbuh kembang, penyediaan akses pendidikan yang berkualitas untuk anak. - Hak atas perlindungan terhadap kekerasan. - Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui forum anak daerah. - Akses terhadap identitas dan hak sipil - Penurunan angka pernikahan anak. - Partisipasi publik yang tinggi terhadap pemenuhan hak anak. <p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan identitas. - Tingginya kekerasan terhadap anak. - Eksploitasi dan pekerja anak. - Pernikahan usia anak yang masih tinggi. - Ketimpangan gender dalam hak anak. - Kurangnya data terpilah anak yang akurat.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan atau Realisasi Anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi sebagai tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Operasi	13.269.031.940	11.832.820.355	89,18
- Belanja Pegawai	4.934.270.514	4.547.029.816	92,15
- Belanja Barang dan Jasa	7.684.761.426	6.735.790.539	87,65
- Belanja Hibah	650.000.000	550.000.000	84,62
Belanja Modal	1.019.669.200	837.778.700	82,16
Jumlah	14.288.701.140	12.670.599.055	88,68

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Daerah DP3AP2KB Tahun 2024

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	6,158,502,816	4.844.408.754	89,64
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	65.290.000	44.014.698	67,41
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.290.000	44.014.698	67,41
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah	4.934.541.514	4.537.705.316	91,96
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.707.086.514	4.360.391.816	92,63
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	212.184.000	172.388.000	81,24
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.271.000	4.925.500	32,25
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	202.675.000	166.572.485	82,19

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	39.150.000	39.150.000	100
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Impelemnatsi Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bimbingan Teknis Impelemnatsi Peraturan Perundang-undangan	163.525.000	127.422.485	77,92
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	212.184.000	172.388.000	81,24
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 269.700	2.015.00	32,25
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.824.300	285.473.800	98,84
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	26.850.000	22.110.100	82,35
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24.016.600	15.942.000	66,38
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	48.310.250	32.463.500	67,20
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.487.100	11.800.000	71,57
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan	Jumlah mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	312.757.000	262.117.555	83,81

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD			
	Kegiatan : Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan BMD	835.766.000	657.446.000	78,66
	Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	774.820.000	596.500.000	76,99
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	27.245.900	27.245.900	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	33.700.100	33.700.200	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang	1.668.963.602	1.489.803.881	89,27
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.360.000	8.250.000	98,68
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.747.000	97.850.601	87,56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.548.856.602	1.383.703.280	89,34
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah BMD yang dipelihara	493.962.124	472.410.564	95,64

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,990,000	38,981,000	99,98
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.210.000	46,021.700	84,90
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	22.950.000	10.937.500	47,66
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah i gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	377.812.124	376.470.364	99,64
2.	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	734.063.000	610.365.100	83,15
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	50.000.000	33.725.100	67,45

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	14.036.000	9.400.700	66,98
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.964,000	24.324.400	67,64
	Kegiatan : Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	684.063.000	576.640.000	84,30
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.	684.063.000	576.640.000	84,30
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Yang Dilindungi	60.000.000	53.962.600	89,94
	Kegiatan : Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.	20.000.000	17.437.800	87,19

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Sub Kegiatan : Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	20.000.000	17.437.800	87,19
	Kegiatan : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	36.524.800	91,31
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban	40.000.000	36.524.800	91,31
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Legalitas Keutuhan dan Kesetaraan Gender	51.927.400	48.269.200	92,96
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	51.927.400	48.269.200	92,96
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan	33.336.000	31.877.000	95,62

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peninglatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.591.400	16.392.200	88,17
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	20.000.000	13.127.000	65,64
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	13.127.000	65,64
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	13.127.000	65,64
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	280.000.000	255.975.850	91,42
	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	127.428.850	91,02

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	127.428.850	91,02
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	128.546.600	91,82
	Sub Kegiatan : Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	128.546.600	91.82
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani	179.835.200	135.882.710	75,56
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Dokumen Hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	69.865.000	40.667.260	58,21

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	69.865.000	40.667.260	58,21
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.970.750	35.276.200	88,26
	Sub Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	39.970.750	35.276.200	88,26
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanna bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupten/kota.	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.999.450	59.939.250	85,63
	Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah	Jumlah Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah	29.99450.750	29.222.750	97,41

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pengembangan KIE perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengembangan KIE perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	39.999.700	30.716.600	76,79
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Kebijakan Daerah Pemetaan Perkiraan Profil/Karakteristik	255.000.000	218.610.500	87,98
	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	30.000.000	25.272.900	84,24
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota.	Jumlah Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	30.000.000	25.272.900	84,24
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	225.0000.000	193.337.600	85,93
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	25.000.000	20.848.600	100

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	sistem informasi	sistem informasi			
	Sub Kegiatan : Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga	60.000.000	60.000.000	100
	Sub Kegiatan : Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	60.000.000	59.100.000	98,50
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan pelaporan data penegndalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan pelaporan data penegndalian lapangan dan pelayanan KB	50.000.000	50.000.000	100
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/kota	30.000.000	3.389.000	11,30
8.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB aktif untuk Pasangan Usia Subur (PUS)	2,052.175.000	1.833.572.350	89,35
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	706.000.000	614.931.050	87,10
	Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	60.000.000	49.535.800	82,56
	Sub Kegiatan : Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan	Jumlah Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan	496.000.000	433.827.500	88,16

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	bangga kencana	bangga kencana			
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media luar ruang.	Jumlah Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media luar ruang.	150.000.000	131.567.750	87,71
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/PLKB	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	400.000.0000	363.736.800	90,93
	Sub Kegiatan Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah laporan Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300.000.000	282.280.500	94,09
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB)	100.000.000	81.456.300	81,46
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuemn Hasil Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	150.425.000	133.059.500	88,46
	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	Jumlah dokumen Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	23.400.000	14.972.200	63,98

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan penggunaan MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60.125.000	56.079.000	93,27
	Sub Kegiatan : Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesejatan s reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah pelayanan keluarga berencana dan kesejatan s reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. Yang dibina	51.900.000	48.118.500	92,17
	Sub Kegiatan : Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	Jumlah kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	15.000.000	13.889.800	92,60
	Kegiatan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB pembinaan terpadu kampung KB.	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	795.750.000	721.845.000	90,71

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	225.750.000	196.095.000	90,71
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung keluarga Berkualitas	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung keluarga Berkualitas	570.000.000	525.750.000	92,24
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	1.728.987.350	1.498.634.246	86,68
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	935.197.350	709.310.546	75,85
	Sub Kegiatan : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	205.187.350	161.845.446	78,88
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah laporan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	280.010.000	164.590.100	58,78

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	450.000.000	382.875,000	85,08
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	793.790.000	789.323.700	99,44
	Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	Jumlah Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	377.990.000	373.523.700	98,82

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
	Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	415.800.000	415.800.000	100

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Seruyan telah disesuaikan dengan perencanaan yang terukur, semoga dalam pelaksanaan prgram/kegiatan tersebut tidak menemukan kendala. Untuk itu diperlukan kerja sama dan integritas seluruh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang direalisasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkapabilitas tinggi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diambil langkah-langkah pelaksanaan dan peningkatan kualitas penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari pelaksana sampai kepada pejabat akan pentingnya penerapan LKjIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
2. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan LKjIP secara komprehensif;
3. Kebijakan yang mewadahi penerapan LKjIP di isntansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan LKjIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah.

Demikian agar seluruh masukan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik, supaya tidak menjadi rutinitas formal semata, namun dapat diberikan timbal balik yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dimasa sekarang dan yang akan datang.

Kuala Pembuang, 3 Maret 2025


Kepala Dinas
JUNAISI, SIP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670712 198911 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUNAIDI, S.I.P**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 23 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. BUPATI SERUYAN


DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


JUNAIDI, S.I.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19670712 198911 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	2,10
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,4
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC
4	Meningkatnya Kondisi Pembangunan Yang Berpihak Pada Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	601-700

	Program	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 800.000.000	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 60.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 50.027.400	APBD
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 20.000.000	APBD
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 280.000.000	APBD
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 179.963.200	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.787.735.840	APBD
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 255.000.000	APBD
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.482.175.000	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.273.799.700	APBD

Pihak Kedua

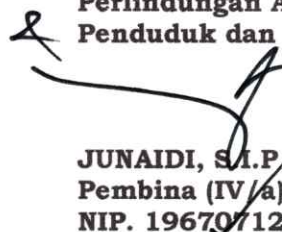
Pj. BUPATI SERUYAN



DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**



**JUNAIDI, S.I.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19670712 198911 1 003**